

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini membahas tentang efektivitas program penanganan Covid-19 yang berada di Kalurahan Panggunharjo. Covid-19 merupakan suatu virus yang mulai menyebar pada penghujung tahun 2019 yang dimulai dari Kota Wuhan China dan kemudian menyebar keseluruh dunia tanpa terkecuali Indonesia. Penyebaran wabah ini telah ditetapkan menjadi Pandemi Covid-19 karena keberadaannya yang belum kunjung reda serta turut menurunkan segala aspek diluar kesehatan seperti halnya ekonomi, social, budaya, bahkan pendidikan (Susanti, Suasa , & Panason , 2021). Dijelaskan dalam Zamrotunnimah (2020) bahwasannya untuk menangani penyebaran wabah dan menekan kasus Covid-19 di Indonesia maka Pemerintah Indonesia menegakkan aturan serta membentuk program dalam menangani Pandemi Covid-19 .Setiap aturan dan program penanganan Pandemi Covid-19 digerakkan mulai dari lingkup desa, daerah, hingga pusat melalui ketentuan umum yakni penerapan protocol kesehatan, kebijakan PSBB, PPKM, dan pengalihan kegiatan berupa aktivitas kerja dan kegiatan pendidikan yang semula dilakukan secara langsung tatap muka kini menjadi daring (online) (Laksmana & Setyawan, 2021).

Menurut Dayanti (2021) penanganan pandemi Covid-19 ini memiliki banyak bidang yang perlu ditangani meskipun pokok utamanya ialah aspek kesehatan. Namun dalam penelitian tersebut dijelaskan pula jika penanganan pada Pandemi Covid-19 perlu dimulai dari tingkat bawah, yakni desa melalui bantuan Pemerintah

Desa dalam menangani Pandemi Covid-19 atau menanggulangi dampak Pandemi Covid-19 dari sisi kesehatan, sosial, Pendidikan, budaya, bahkan ekonomi agar seluruh masyarakat dari tingkat bawah yakni desa hingga pusat dapat ditangani secara adil dan merata.

Salah satu contoh program yang dilakukan dalam penanganan pandemi Covid-19 pada tingkat desa dibuktikan dengan keberhasilan Desa Jati Kulon di Kabupaten Kudus menjadi Top 21 Inovasi Pelayanan Publik pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 yang menerapkan penanganan pada Pandemi Covid-19 melalui Program Jogo Tonggo berupa efektivitas program pada 4 sektor, yakni kesehatan, ekonomi, sosial dan hiburan. Dengan diberlakukannya Program Jogo Tonggo tersebut telah mampu membawa Desa Jati Kulon di Kabupaten Kudus untuk tetap melaksanakan kegiatan meskipun saat masa Pandemi Covid-19 (Pratama, 2021).

Mengulas perihal penanganan Pandemi Covid-19 pada tingkat desa maka pada penelitian ini, peneliti hendak membahas dan memaparkan terkait penanganan Pandemi Covid-19 ditingkat desa, yakni Kalurahan Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diketahui jika Pemerintah Kalurahan Panggunharjo telah membentuk kebijakan guna mendukung penanganan Pandemi Covid-19 dengan membentuk kebijakan *Lapor dan Dukung* yang bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi kesehatan dan serta dampak yang ditimbulkan dari adanya Pandemi Covid-19 serta mengantisipasi penyebaran wabah dilingkup masyarakat Kalurahan Panggunharjo (Tim Komunikasi Gugus Nasional, 2020).

Dipilihnya Kalurahan Panggunharjo sebagai objek penelitian karena tingkat penderita Covid-19 di kalurahan tersebut sangat tinggi, yaitu mencapai lebih dari 2.500 kasus. Tingginya angka penderita Covid-19 di Kalurahan Panggunharjo dikarenakan tingginya mobilitas warga, serta berbatasan langsung dengan pusat kota Yogyakarta. Namun demikian, meskipun angka penderita Covid-19 di Kalurahan Panggunharjo sempat tinggi tetapi kalurahan tersebut berhasil menjalankan program penanganan Covid-19 dengan, sehingga warga yang mengalami positif Covid-19 dapat segera tertangani. Pada akhir bulan Desember 2021, jumlah penderita Covid-19 di Kalurahan Panggunharjo hanya tersisa 16 kasus, sedangkan kasus meninggal mencapai 99 kasus. Meskipun kasus meninggal cukup tinggi, namun hasil tersebut menunjukkan bahwa program penanganan Covid-19 di Kalurahan Panggunharjo dapat berjalan dengan baik.

Tidak hanya berhenti pada pembentukan kebijakan Laporan dan Dukungan saja akan tetapi Pemerintah Kalurahan Panggunharjo juga melakukan beberapa penanganan Pandemi Covid-19 bagi desa setempat yakni pada bidang kesehatan dengan membentuk Program Shelter Desa yang merupakan shelter penanganan Pandemi Covid-19 bagi masyarakat berupa tempat penyediaan isolasi mandiri, karantina, serta tempat pemeriksaan kondisi masyarakat. Pada pelaksanaan program ini Pemerintah Desa Panggunharjo bekerjasama dengan lintas instansi, yakni Puskesmas Sewon I, Puskesmas Sewon II, Karangtaruna, dan Linmas Kalurahan Panggunharjo (Junaedi & Birawa, 2021).

Upaya berikutnya dalam penanganan Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Panggunharjo ialah membentuk program Shelter Desa

guna menangani dampak Pandemi Covid-19 pada sisi kesehatan, terdapat pula penanggulangan Pandemi Covid-19 dengan pengadaan vaksin yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Panggungharjo. Dijelaskan dalam data Kalurahan Panggungharjo yang telah direkap oleh pihak PSID Kalurahan Panggungharjo, maka pada Bulan Agustus terdapat 1.100 jumlah penerima vaksin Covid-19 dari ketersediaan 3.000 vaksin untuk masyarakat Kalurahan Panggungharjo. Pelaksanaan vaksin ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Panggungharjo yang bekerjasama dengan pihak Puskesmas 1 Sewon yang berlokasi di Pondok Pesantren Krapyak pada 22 Agustus 2021 (Bhirawa, 2020). Pada bulan selanjutnya, yakni 22 September 2021, terdapat jumlah partisipasi vaksin yang sama, yakni 1.100 penerima vaksin bagi masyarakat Kalurahan Panggungharjo yang terlaksana di The Ratan sebagai bentuk kerjasama Kalurahan Panggungharjo dengan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Provinsi DIY (Pemerintah Kabupaten Bantul Kapanewon Sewon, 2021). Dibulan Oktober, Pemerintah Kalurahan Panggungharjo bersama Komunitas Sambatan Jogja juga menggelar vaksinasi bagi masyarakat Kalurahan Panggungharjo yang telah diterima oleh 750 masyarakat yang melakukan vaksinasi (Pemerintah Kabupaten Bantul Kapanewon Sewon, 2021).

Pengadaan dan pemberian vaksin Covid-19 yang disalurkan oleh Pemerintah Kalurahan Panggungharjo pada masyarakat Kalurahan Panggungharjo merupakan salah satu wujud dari pencegahan dan penanganan pada penyebaran virus dimasa Pandemi Covid-19. Meskipun tidak memberikan jaminan penyelesaian pada penyebaran virus, akan tetapi dengan adanya pengadaan dan pemberian vaksin

Covid-19 maka mampu meminimalisir penyebaran virus dan pertumbuhan virus ditubuh seseorang sebab adanya kandungan vaksin yang bertujuan untuk meningkatkan metabolisme tubuh dan mematikan bibit virus yang tidak menutup kemungkinan merupakan bagian dari virus corona (Octarina, Kongres, & Mardika, 2021).

Selanjutnya guna menangani Pandemi Covid-19 serta dampak yang ditimbulkan, maka Pemerintah Desa Panggungharjo juga melaksanakan beberapa upaya dalam menangani permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat desa melalui pemanfaatan teknologi dalam penyaluran BLT-DD dan penjualan produk UMKM yang dirangkai dalam suatu platform *Pasardesa.id*. Platform tersebut bertujuan untuk menghindari kecurangan pada penyaluran dana bantuan sosial masyarakat serta menstabilkan kebutuhan dengan memanfaatkan ketersediaan produk yang dimiliki masyarakat desa yang berbasis kemandirian dan pemanfaatan produk lokal sesuai dengan Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 9 Tahun 2015. Adapun platform tersebut ialah *Pasardesa.id*. *Pasardesa.id* dibentuk pada bulan April 2020 dan diresmikan oleh Kementerian PDTT pada tanggal 13 April 2020 (Kafa, 2020).

Dari beberapa penjabaran terkait upaya penanganan Pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Panggungharjo maka peneliti hendak mengukur tingkat efektivitas yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan dan program penanganan Pandemi Covid -19 di Kalurahan Panggungharjo serta menganalisa terkait ketepatan sasaran dengan tujuan sehingga peneliti dapat mengetahui hasil yang ditimbulkan dari program penanganan Pandemi Caaovid-

19 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Panggunharjo. Tidak hanya itu, guna mengukur efektivitas pada pelaksanaan program penanganan Pandemi Covid-19 yang dilaksanakan di Kalurahan Panggunharjo maka peneliti juga ingin mengetahui dan memaparkan tentang pemantauan dan pengawas dari program agar peneliti dapat membagikan validitas pelaksanaan program yang diukur dari ketepatan tujuan dengan ketepatan sasaran melalui produktivitas dari stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan program tersebut serta peneliti hendak menganalisa dan memaparkan tentang pengawasan program dan hasil yang diberikan dari pelaksanaan program sehingga timbul suatu penilaian terkait tingkat efektivitas (Melati & Zulkarnain , 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “Efektivitas Proram Penanganan Pandemi Covid-19 di Kalurahan Panggunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2020-2021”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana efektivitas pelaksanaan program penanganan Pandemi Covid-19 di Kalurahan Panggunharjo?
- 1.2.2 Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program penanganan Pandemi Covid-19 di Kalurahan Panggunharjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan memaparkan sejauh mana efektivitas Pemerintah Kalurahan Panggunharjo dalam pelaksanaan program penanganan Pandemi Covid-19 di Kalurahan Panggunharjo serta faktor yang mempengaruhi dalam

mencapai efektivitas dari pelaksanaan program penanganan Pandemi Covid-19 di Kalurahan Panggungharjo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang di dapatkan dari penelitian ini ialah mengetahui mengembangkan pengetahuan dan keilmuan yang di dapatkan dari materi perkuliahan khususnya mengenai evaluasi kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu, manfaat dari adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan kedepan bagi pembaca tentang efektivitas yang telah di laksanakan Pemerintah Kabupaten Kudus guna menekan angka penularan Covid-19 .

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang di dapatkan dari penelitian ini ialah adanya pandangan bagi pemerintah desa lain untuk melakukan kegiatan yang serupa dalam penekanan angka Covid-19 melalui vaksinasi serta memberikan bukti yang konkret mengenai keberhasilan dan kegagalan Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dalam mengadakan dan melaksanakan vaksin Covid-19 .

1.5 Kajian Pustaka

Menurut (Julaidin & Sari, 2020), sebagai garda terdepan dalam menangani Covid-19 di Indonesia, seperti halnya menerapkan kebijakan mengenai perlindungan petugas kesehatan, sosial distancing, transparansi informasi, dan validasi data terkait kasus wabah ini serta pemberian sanksi bagi masyarakat yang melanggar sesuai Surat Kapolri Telegram Nomor ST/1098/IV tentang pemberian

sanksi bagi pelanggar kebijakan penanganan Covid-19 . Upaya preventif dan represif dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penanganan wabah Covid-19 di Indonesia melalui pembuatan produk hukum yang sah agar pemerintah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan publik. (Cahyandari, Hadiyantina, & Ramadhan, 2020).

Meski pengadaan regulasi dianggap penting, akan tetapi Rizal (2020) penanganan Covid-19 di anggap kurang efektif dan efisien sebab apabila dilihat dari interpretasi, kondisi permasalahan, situasi dan cara penanganan justru kurang bekerja secara maksimal. Dalam penelitian Ristyawati (2020) perihal kebijakan Covid-19 , yakni terdapat latar belakang lain yang mengakibatkan masyarakat belum mematuhi kebijakan pemberlakuan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, sering mencuci tangan, menggunakan masker dan hand sanitizer. Kemudian, pemerintah menjamin adanya bantuan bagi masyarakat sebagai wujud dukungan moral dan materi dalam menghadapi pandemi ini khususnya terhadap masyarakat menengah kebawah (Ristyawati, 2020).

Dijelaskan dalam Valerisha & Putra (2020), bahwasannya diperlukan pula transparansi data terkait Covid-19 yang disalurkan secara terang-terangan melalui media sosio digital sebagai bentuk keterbukaan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah selaku pembentuk kebijakan dan program sekaligus pelaksana (Fadilah, Pariyana, Dewi , & Anggraini , 2021). Penelitian Meryati, (2021) saat ini, Indonesia sedang menuju upaya untuk menyelesaikan pandemi Covid 19 dengan menjalin kontrak pembelian vaksin Covid 19 dengan tiga produsen vaksin asal RRC yakni Cansino, G42/Sinopharm dan SinoVac.

Harapannya wabah Covid 19 bisa tertangani segera untuk memulihkan warga dan ekonomi negara (Akbar, 2021). Vaksin Covid-19 memang seyogyanya menjadi hak milik publik demi kepentingan kesehatan masyarakat global, maka pemerintah ataupun negara-negara dunia diharapkan menentukan apa dan bagaimana kebijakan yang sebaiknya dilakukan untuk mempercepat akses Vaksin Covid-19 secara adil dan merata, namun tetap mengakui keberadaan hak paten di dalamnya (Octarina, Kongres , & Mardika , 2021) (Gandrayani & Hadi, 2021).

Dijelaskan dalam Astuti & Nugroho (2021) bahwa penerimaan vaksinasi Covid-19 menjadi hal yang penuh polemic berupa kekurangan informasi yang dialami masyarakat serta kurangnya sikap siaga pemerintah untuk mengedukasikan terkait Vaksinasi. Menurut Rosidi (2020) vaksinasi Covid-19 sudah dimulai di Indonesia sejak awal tahun 2021 yang dibuktikan dengan penerima sertifikat vaksin (Wibowo, 2021). Pada tanggal 9 November 2020, ketika vaksin pertama dengan tingkat efektif lebih dari 90% telah diumumkan mengingat kedua komponen tersebut dapat memenuhi kebutuhan vaksin sehingga masyarakat mendapatkan vaksin secara merata (Sriwidodo, 2021). Berdasarkan analisis, dapat diamati bahwa sebagian besar tweet memiliki sikap positif (60,3 %), sementara jumlah tweet yang netral (34,4 %) melebihi jumlah tweet yang menentang (5,4 %). Nilai akurasi yang dihasilkan sebesar 0,93 (93 %) (Yulita, 2021).

Penginformasian vaksinasi kini dapat dilakukan melalui media sosial khususnya pada Twitter merupakan implementasi pemrosesan teks secara eksplisit dengan menggunakan data cuitan pada media sosial Twitter untuk menghasilkan informasi (Yanuarti, 2021). Media sosial *Twitter* digunakan untuk melihat interaksi

yang terjadi antar netizen Indonesia terkait kejadian Covid-19 , khususnya vaksinasi Covid-19 yang dilakukan di Indonesia serta menghindari hadirnya hoax terkait vaksinasi yang menyebutkan jika vaksin Covid 19 mengandung bahan berbahaya diantaranya boraks, formalin, sel vero, bahkan ada yang menyebutkan vaksin dibuat dari janin bayi laki-laki. Adapun hoax tentang efek samping adalah kematian, kemandulan, memperbesar alat vital pria, dan memodifikasi DNA manusia. (Nurdiana, 2021). (Sukmani, 2021) (Rahayu & Sensusiyati,2021). Menurut Dewi (2021) dijelaskan jika keberhasilan program vaksinasi Covid-19 bergantung pada banyak faktor, dan komunikasi publik menjadi salah satu kunci keberhasilan tersebut. Dampak vaksin di masyarakat bukan hanya ditentukan oleh efikasinya, maka pemerintah harus terus melakukan upaya edukasi dan mendorong pelibatan masyarakat secara aktif untuk patuh menerapkan protokol kesehatan Covid-19 (Nasir, Joyosemito , & Boerman , 2021).

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Isi Penelitian
(Julaidin & Sari, 2020)	Kebijakan Hukum di Tengah Penanganan Wabah Corona Virus Disease (Covid-19). Unnes Law Review, Vol.1.No.1	Sebagai garda terdepan dalam menangani Covid-19 di Indonesia, pemerintah sudah seharusnya melakukan berbagai upaya seperti halnya menerapkan kebijakan mengenai perlindungan petugas kesehatan, sosial distancing, transparansi informasi, dan validasi data terkait kasus wabah ini.
(Prasetio, 2021)	Pandemi Covid-19 : Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan	Upaya preventif dan represif dapat dilakukan oleh pemerintah dalam

	Perlindungan HAM. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No.2	ragka penanganan wabah Covid-19 di Indonesia melalui pembuatan produk hukum yang sah. Sementara itu untuk represif merupakan penyesuaian dan evaluasi dari kebijakan yang di bentuk.
(Rizal, 2020)	Perspektif Siyasa Syar'iyah tentang Darurat Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 . Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan. Vol.14, No. 1	Kebijakan mengenai penanganan Covid-19 di anggap kurang efektif dan efisien sebab apabila dilihat dari interpretasi, kondisi permasalahan, situasi dan cara penanganan justru kurang bekerja secara maksimal.
(Munawar, 2021)	Studi Perilaku Masyarakat Aceh Dalam Menghadapi Pandemik Covid-19 . The 2nd Seminar on Population, Family, and Human Resource	Perihal kebijakan Covid-19 , yakni terdapat latar belakang lain yang mengakibatkan masyarakat belum mematuhi kebijakan pemberlakuan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, sering mencuci tangan, menggunakan masker dan hand sanitizer.
(Valerisha & Putra , 2020)	Pandemi Global Covid-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-digital?. Jurnal Hubungan Internasional. Vol.1 No.1	Transparansi data terkait Covid-19 yang disalurkan secara terang-terangan melalui media sosio digital sebagai bentuk keterbukaan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah selaku pembentuk kebijakan dan program sekaligus pelaksana.
(Muhyiddin, 2020)	Covid-19 , New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. The Indonesian Journal of	Pemerintah mempunyai 3 alternatif dalam perencanaan jangka menengah, yakni rencana semula, melakukan revisi moderat, atau mengganti

	Development Planning. Vol.4, No.1	dengan rencana yang baru dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbaharui dengan datangnya pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang mengiringinya.
(Fadilah, Pariyana, Dewi , & Anggraini , 2021)	Gambaran Karakteristik Pengetahuan dan Persepsi Masyarakat Awam Mengenai Pandemi Covid-19 si Era New Normal. Indonesian Journal for Health Science. Vol.5, No.1	Penyebarluasan informasi terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia guna menunjukkan persepsi positif terhadap risiko infeksi, pentingnya memakai masker dan physical distancing, perilaku cuci tangan, isolasi mandiri, dan konsumsi makanan bergizi selama pandemi Covid-19 ini.
(Meryati, 2021)	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Mengenai Pentingnya Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Kelurahan Ciputat. Dedikasi PKM, Vol. 2, No.2	Pendidikan yang efektif dapat dilakukan dengan pemberian contoh terhadap masyarakat terkait pentingnya penjagaan kebersihan, penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi Covid-19 .
(Akbar, 2021)	Vaksinasi Covid-19 dan Kebijakan Negara : Perspektif Ekonomi Politik. Jurnal Akademi Praja. Vol. 4, No.1	Harapannya wabah Covid 19 bisa tertangani segera untuk memulihkan warga dan ekonomi negara melalui jalinan kontrak pembelian vaksin Covid 19 dengan tiga produsen vaksin asal RRC yakni Cansino, G42/Sinopharm dan SinoVac.
(Octarina, Kongres, & Mardika, 2021)	Urgensi Penemuan Vaksin Covid-19 sebagai Hak Milik Publik. Jurnal	Vaksin Covid-19 memang seyogyanya menjadi hak milik publik demi kepentingan kesehatan

	PANDECTA, Vol. 16, No.1	masyarakat global, maka pemerintah diharapkan menentukan kebijakan untuk mempercepat akses Vaksin Covid -19 secara adil dan merata
(Astuti & Nugroho , 2021)	Persepsi Masyarakat terhadap Penerimaan Vaksinasi Covid-19 : Literature Review. Jurnal Keperawatan, Vol. 13, No.1	Penerimaan vaksinasi Covid-19 menjadi hal yang penuh polemic sebab dianggap kurang efektif sehingga menimbulkan penolakan masyarakat terhadap vaksin Covid-19 .
		Vaksinasi Covid-19 sudah dimulai di Indonesia sejak awal tahun 2021, ditandai dengan Presiden Indonesia sebagai penerima vaksin dosis pertama. Setelah dua minggu kemudian dilanjutkan dengan dosis kedua.
(Wibowo, 2021)	Pencetakan Sertifikat Vaksin oleh Pihak Swasta.	Pembuktian sebagai orang telah melakukan vaksin adalah menerima sertifikat vaksin
(Gandryani & Hadi , 2021)	Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia ; Hak atau Kewajiban Warga Negara. Jurnal Retchviding, Vol. 10, No.1	Vaksinasi Covid-19 di Indonesia pada mulanya adalah hak setiap orang, dapat menjadi suatu kewajiban mengingat situasi kedaruratan di Indonesia saat ini
(Sriwidodo, 2021)	Perkembangan Teknologi terkini dalam Mempercepat Produksi Vaksin Covid-19 . Jurnal Majalah Farmasetika, Vol. 5, No.5	Teknologi serta Media sosial telah menjadi pendukung penting bagi penyaluran informasi serta pendaftaran pelaksanaan vaksin Covid-19 bagi masyarakat agar masyarakat memiliki kemudahan untuk mengetahui jadwal vaksinasi.

(Yulita, 2021)	Analisis Sentimen Terhadap Opini Masyarakat Tentang Vaksin Covid-19 Menggunakan Algoritma Naïve Bayes Classifier. Jurnal Data Mining dan Sistem Informasi, Vol. 2, No.2	Media sosial telah bereaksi dan orang-orang di seluruh dunia mulai mengekspresikan perasaan mereka terkait dengan vaksinasi.
(Yanuarti, 2021)	Analisis Media Sosial Twitter Terhadap Topik Vaksinasi Covid-19 . JUSTINDO: Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi Indonesia, Vol. 6, No.2	Penginformasian vaksinasi kini dapat dilakukan melalui media Twitter merupakan implementasi pemrosesan teks secara eksplisit dengan menggunakan data cuitan pada media sosial Twitter untuk menghasilkan informasi.
(Sukmani, 2021)	Analisis Postingan di Twitter Mengenai Vaksinasi Covid-19 : Perilaku Sosial Terhadap Vaksinasi Covid-19 Guna Pencegahan Penularan Covid-19 . HUMAYA : Jurnal Hukum, Humaniora, dan Masyarakat dan Budaya, Vol.1, No.1	Media sosial <i>Twitter</i> digunakan untuk melihat interaksi yang terjadi antar netizen Indonesia terkait kejadian Covid-19 , khususnya vaksinasi Covid-19 yang dilakukan di Indonesia
(Nurdiana, 2021)	Berantas Hoax Seputar Vaksin Covid-19 Melalui Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Vaksin Covid-19 . Abdi UMTAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 4, No.1	Media massa dan teknologi juga dapat dijadikan sebagai berita hoax terkait vaksin Covid-19 , adapun pihak yang berperan dalam pemberantasan hoax tersebut ialah tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan dalam penjelasan dan penyebaran info seputar vaksin

(Rahayu & Sensusiyati , 2021)	Vaksin Covid-19 di Indonesia : Analisis Berita Hoax. Jurnal Elektiva, Vol.2 No.7	Validitas vaksinasi sangatlah dibutuhkan mengingat hadirnya hoax tentang vaksin Covid 19 mengandung bahan berbahaya diantaranya boraks, formalin, sel vero, bahkan ada yang menyebutkan vaksin dibuat dari janin bayi laki-laki.
(Dewi, 2021)	Komunikasi Publik Terkait Vaksinasi Covid 19 . Health Care: Jurnal Kesehatan, Vol. 10, No.1	Keberhasilan program vaksinasi Covid-19 bergantung pada banyak faktor, dan komunikasi publik menjadi salah satu kunci keberhasilan tersebut.
(Nasir, Joyosemito , & Boerman, 2021)	Kebijakan Vaksinasi Covid-19 : Pendekatan Pemodelan Matematika Dinamis Pada Efektivitas Dan Dampak Vaksin Di Indonesia. Jurnal ABDIMAS : Pengabdian Masyarakat, Vol.4, No.2	Dampak vaksin di masyarakat bukan hanya ditentukan oleh efikasinya, maka pemerintah harus terus melakukan upaya edukasi dan mendorong pelibatan masyarakat secara aktif untuk patuh menerapkan protokol kesehatan Covid-19

Berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang terdapat pada kajian pustaka, maka peneliti hendak memberikan perbedaan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti dengan perbedaan pada penelitian lain. Adapun perbedaan yang akan peneliti berikan dan paparkan dalam penelitian ini ialah pada penelitian ini, peneliti hendak mengulas, menganalisa, dan membahas terkait efektivitas program penanganan Pandemi Covid-19 di Kalurahan Panggunharjo. Peneliti akan tetapi membahas pula terkait kejelasan tujuan, ketepatan sasaran, produktivitas stakeholder, dan pengawasan serta pengendalian dari pelaksanaan

program penanganan Pandemi Covid-19 yang terdapat di Kalurahan Panggungharjo sebab belum terdapat penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan program penanganan Pandemi Covid-19 di Kalurahan Panggungharjo sebab dari beberapa penelitian lain yang peneliti temui dan pelajari baru membahas tentang sosialisasi Covid-19 namun peneliti belum menemukan spesifikasi tentang ketepatan pada tujuan, sasaran, ketepatan produktivitas dari stakeholder dan pengawasan serta pengendalian. Tidak hanya itu, dari beberapa penelitian yang ditemui juga belum difokuskan terkait lokasi penelitiannya hanya sekilas pada Indonesia, terlebih pada lokasi yang peneliti pilih pun belum terdapat penelitian mengenai vaksinasi di Kalurahan Panggungharjo.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Efektivitas Program

Efektivitas program merupakan pemanfaatan sarana, prasarana, dan sumber daya untuk mendapatkan keberhasilan melalui barang ataupun jasa. Pada konsep ini, efektivitas dapat dijadikan sebagai penunjuk atas keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam membentuk dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan (Siagian, 2001). Apabila kontribusi output dengan sasaran semakin besar, maka semakin efektif pula kebijakan atau program yang dibentuk, begitu pula jika hasil yang didapatkan tidak tepat sasaran maka pelaksanaan kebijakan dan program tersebut dapat dikatakan tidak efektif (Mahmudi, 2005). Keberhasilan dari efektivitas pemerintah tidak hanya mempertimbangkan tujuan saja, akan tetapi bagaimana penyelenggara kebijakan mampu mempertahankan keberhasilan yang di capai.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mardiasmo sebagaimana dikutip dalam tulisan Yunita & Christianingrum (2019), efektivitas memiliki definisi sebagai ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan yang dilakukan oleh organisasi. Dalam hal ini, kriteria utama dalam menilai suatu program dapat dikatakan efektif atau tidak dilihat dari seberapa jauh hasil yang didapatkan dari tujuan yang semula ingin dicapai oleh suatu organisasi. Jika organisasi tersebut telah mencapai hasil sebagaimana menjadi tujuan awal yang ingin diraih, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan secara efektif (Yunita & Christianingrum, 2019). Hal ini sejalan dengan konsep efektivitas yang dipaparkan oleh Priyanda & Ubaidullah, di mana efektivitas merupakan bentuk kesesuaian suatu kegiatan orang/badan yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju, dengan melihat seberapa baik dan efektif hasil yang didapatkan berdasarkan tujuan/sasaran tersebut (Priyanda & Ubaidullah, 2020).

Menurut Halim dalam Mulyadi (2019), efektivitas merupakan pola hubungan antar *output* atau hasil yang dicapai oleh seseorang/organisasi. Hubungan ini merujuk pada korelasi antara *output* pusat tanggungjawab (pelaksana kegiatan yang dapat berupa orang/organisasi) dengan tujuan yang ingin dicapai. Dikatakan bahwa semakin besar kontribusi *output* terhadap tujuan, maka semakin efektif satu unit tersebut. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa konsep efektivitas merupakan pemahaman mengenai seberapa jauh organisasi telah mencapai tujuannya.

Dalam Mingkid, et al (2017), efektivitas adalah landasan kegiatan berdasarkan pemenuhan kriteria keaktifan, daya guna, dan kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Hal ini sependapat dengan Ravianto dalam Masruri (2014), di mana efektivitas diartikan sebagai seberapa baik pekerjaan yang dilakukan serta sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan (Mingkid et al., 2017). Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif bila diselesaikan dengan perencanaan yang mempertimbangkan waktu, biaya, dan mutu, sehingga menghasilkan keluaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan. Sebagaimana dikutip oleh Raharjo et al. (2018), efektivitas diartikan sebagai kegiatan mengerjakan sesuatu yang benar atau menyempurnakan kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Disempurnakan oleh Griffin, efektivitas didefinisikan sebagai langkah membuat keputusan yang benar dan berhasil dalam implementasi keputusan tersebut guna mencapai tujuan. Adapun indikator efektivitas program menurut Gibson (19 97), dalam (Kharisma & Yuniningsih , 2017), yakni :

1. Kejelasan program : Adanya tujuan dan sasaran yang jelas dari dari keberlangsungan program
2. Pelaksanaan program : Adanya kegiatan dalam pelaksanaan program
3. Produktivitas stakeholder : Keikut sertaan suatu stakeholder atau pelaksana program yang terdapat pada suatu program dalam melaksanakan program dan kegiatan

4. Pengawasan dan pengendalian program : Terdapatnya pengawas dan pengendali program dalam setiap kegiatan untuk memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan dalam suatu program
5. Hasil Program : Hasil yang ditunjukkan dari kegiatan yang terdapat dalam program dilihat dari output kegiatan dalam suatu program yang sesuai kesesuaian antara kegiatan yang dijalankan dalam program dengan tujuan dan sasaran yang telah dibentuk.

Setelah tercapainya indikator dari efektivitas program, maka pembentuk dan pelaksana program dapat menilai tingkat efektivitas berdasarkan dari ketercapaian indikator menurut Gibson (19 97) dalam Winardi (19 90) yang dianalisa melalui beberapa faktor yang mempengaruhi, adapun faktor tersebut ialah sebagai berikut :

1. Kemampuan pelaksana program dalam mengkoordinasi kelompok atau instansi penyelenggara program dalam mencapai tujuan dan sasaran.
2. Keahlian pelaksana program dalam menangani permasalahan yang ada dalam program serta mengarahkan anggota ketika melakukan kegiatan
3. Pengetahuan pelaksana program yang diiringi dengan ketepatan sikap dalam program.
4. Motivasi penyelenggara dan pelaksana program yang dilatar belakangi dari adanya keinginan untuk pencapaian kesuksesan dari hasil program.

1.6.2 Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki peran untuk mengatur kepentingan publik yang berada pada tingkat desa atau

kelurahan agar wilayah tersebut berjalan secara optimal. Pemerintahan di tingkat Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa beserta sekretaris desa. Pemerintahan Desa telah memiliki kewenangannya sendiri atau yang biasa disebut dengan otonomi daerah berupa kewenangan untuk menyusun anggaran, mengatur tatanan kebijakan dan kegiatan desa serta urusan lain yang berkaitan dengan publik dilingkup desa. Perihal perangkat desa selaku pihak yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan desa maka terdapat beberapa bagian dalam perangkat tersebut seperti yang terdapat dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, serta pelaksana teknis. Perangkat tersebut diangkat oleh Kepala Desa yang dikonsultasikan dengan Camat dibawah naungan Kepala Daerah (Ramdhani, 2019). Kewenangan pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah meliputi penyelenggaraan sistem pemerintahan, membangun desa, membina masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa berdasarkan dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat pada desa (Endah, 2018). Dijelaskan dalam Lanak (2021) bahwasannya pemerintah desa mampu mewujudkan pembangunan wilayah desa serta terciptanya kesejahteraan dan kemajuan kehidupan masyarakat desa sehingga dengan adanya pengaturan ditingkat desa mampu membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan dan mewujudkan pemerintahan negara yang efektif.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang

didesa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur tugas dan mengurus kepentingan masyarakat. Pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya pada Bupati tebusan Camat. Kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan perangkat desa, mengadakan pengawasan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang. Apabila terjadi kekosongan perangkat desa, maka Kepala Desa atas persetujuan BPD mengangkat jabatan perangkat desa (Sugiman, 2018).

Menurut Dwipayana dkk (2003:22) bahwa pemerintahan desa yang demokratis (partisipatif, akuntabel, transparansi dan responsif) bisa semakin kokoh dan mampu bekerja secara efektif bila ditopang oleh kesejajaran,

keseimbangan, dan kepercayaan antar elemen di desa. Selain memiliki hak serta kewenangan pada sistem administrative dan pembangunan, Pemerintahan Desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola keuangan guna penyelenggaraan urusan ditingkat desa dikelaola oleh dana APBDesa yang berasal dari APBD (Maumeha, Liando, & Kairupan, 2017). Dengan adanya otonomi pada tingkat Pemerintahan Desa maka tercipta suatu model pengaturan yang berbasis masyarakat berupa self government community yang merupakan suatu sistem pemerintahan berdasarkan dengan inisiatif tanpa adanya campur tangan pihak lain dalam mengatur urusan publik melalui kemampuan lembaga yang dimiliki sehingga tercipta perkembangan berupa penyelesaian masalah yang dihadapi (Rifan & Rahmawati, 2021). Penyelenggaraan pemerintahan desa harus berbasis kepada peran serta masyarakat dan secara historis desa sebagai pemerintahan yang tumbuh berdasarkan kepentingan masyarakat hidup bersama-sama pada kenyataannya belum berjalan sesuai dengan harapan. Secara historis, desa merupakan salah satu faktor terbentuknya masyarakat di Indonesia serta politik dan pemerintahan di Indoensia. Hal ini disebabkan dari adanya masyarakat adat yang memiliki hukum adat tersendiri sebab desa merupakan struktur sosial yang sangat vital mengingat tingkat kemandirian masyarakat desa begitu tinggi sebab adanya otonomi yang tinggi .

Pada Pasal 200 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa pada Pasal telah dijelaskan bahwasannya dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan Desa yang terdiri

dari pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa. Adanya sistem pemerintahan desa yang berbasis kemasyarakatan, maka seluruh hal yang berkaitan dengan pembentukan, penghapusan dan/atau menggabungkan Desa maka wali dilakukan berdasarkan atas prakarsa prakarsa masyarakat. Dalam menjalankan perannya, maka diperlukan beberapa faktor untuk mencapai efektivitas dalam Pemerintahan Desa berbasis kemasyarakatan, yakni melalui keadaan SDA, kondisi SDM, kemampuan lembaga, kebijakan lembaga, organisasi dan administrasi pemberdayaan masyarakat, serta sarana dan prasarana guna melaksanakan pembangunan (Suprojo, 2019). Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah Desa bersama badan permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Perda.

Menurut tinjauan Hukum Tata Negara dan Pemerintahan, dapat diartikan bahwa hubungan kewenangan antara pemerintah Desa dan pemerintah kelurahan keduanya memiliki kewenangan yang jelas sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah di dalam menerapkan fungsi peraturan di dalam melaksanakan pemerintahan daerah dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga pemerintahan daerah dan perangkat-perangkat pemerintahan daerah berjalan dengan mengembangkan hubungan kewenangan yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang mendasarinya (Ichwan, 2019).

Dijelaskan dalam Kusnendar (2018) bahwa indikator pada Pemerintahan Desa sebagai berikut :

1. Produktivitas : Hasil dari pelayanan publik berdasarkan inovasi pelayanan yang dapat memberikan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat.
2. Kualitas Pelayanan : Pengukuran terhadap pelayanan yang diberikan terhadap publik yang dibuktikan dengan adanya papan pengumuman serta penyampaian informasi yang lebih intensif dilakukan kepala dusun selaku pemerintah desa, meskipun pada pelaksanaannya tidak seratus persen informasi itu dapat di tanggapi masyarakat.
3. Resposivitas : kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan programprogram pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. Responsibilitas : Kesesuaian kegiatan organisasi dengan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi sesuai dengan kebijakan organisasi

1.6.3 Penanganan Wabah Pandemi Covid -19

Penanganan wabah Covid-19 merupakan tindakan dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan pertahanan negara terkait penyakit menular sebagai isu sosial dan kesehatan yang membutuhkan perhatian serta tindakan khusus dalam penanganannya. Pandemi Covid-19 megakibatkan kondisi genting sebab keberadaannya yang dapat menular melalui udara dan sentuhan fisik manusia sehingga berpotensi untuk terus berkembang dari waktu kewaktu apabila tidak di tangani dengan baik (Rizal, 2020). Tujuan dari penanganan wabah ini ialah sebagai penekan atauantisipasi lonjakan korban wabah virus serta melakukan pembenahan pada kondisi lingkungan dan kesehatan

masyarakat. Adapun penyebab dari wabah Covid-19 ini ialah berasal dari suatu daerah di Negara Cina, yakni Wuhan yang ditularkan dari hewan-hewan tidak lazim untuk dikonsumsi masyarakat, kemudian mengakibatkan infeksi virus dan mengganggu kesehatan masyarakat setempat. Penyakit tersebut memiliki gejala seperti halnya (Karyono, Rohadin, & Indriyani, 2020) :

1. Batuk berlebihan
2. Gangguan sistem pernafasan dan pencernaan
3. Letih dan lesu
4. Menurunnya nafsu makan
5. Demam berkepanjangan

Wabah penyakit ini terkategori dalam bencana non alam sebab dampak yang ditimbulkan lebih cenerung pada sosial dan kesehatan masyarakat. Penanganan bencana wabah ini dapat dilakukan mulai dari penetapan status siaga wilayah terhadap kondisi yang mampu mengancam keselamatan atau kesehatan masyarakat, kemudian berlangsung pada kegiatan yang mengantisipasi penyebaran wabah, melakukan pengobatan bagi korban yang terkena wabah serta penginstruksian isolasi diri bagi masyarakat lainnya, dan melakukan perbaikan di bidang kesehatan melalui protokol atau kebijakan yang dibentuk agar tidak mengakibatkan penyebaran wabah virus lebih lanjut juga pembenahan di bidang sosial dan ekonomi sebab tidak dipungkiri pula dengan adanya penyebaran wabah tersebut sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan dan kegiatan sosialnya.

Guna mempercepat penanganan wabah virus Covid-19 , setiap daerah memiliki mekanisme yang berbeda satu sama lain dalam penanggulangan bencana wabah, hal tersebut di sebabkan oleh adanya perbedaan potensi penyebaran virus di wilayah setempat sehingga tidak dapat di samakan secara keseluruhan. Dalam hal ini, otonomi daerah pun juga turut serta dalam pelaksanaan penanganan wabah bencana Covid-19 . Selain itu, hal terpenting dalam penanganan wabah ialah terdapatnya komunikasi yang stabil antar organisasi perangkat daerah untuk saling berkoordinasi dengan seluruh agen non pemerintahan baik swasta atau bahkan masyarakat (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 , 2019).

Penanganan wabah pandemi Covid-19 kini telah beranjak terhadap pelaksanaan vaksin Covid-19 . Diketahui jika pengadaan dan pemberian vaksin Covid-19 pada masyarakat merupakan salah satu wujud dari pencegahan dan penanganan pada penyebaran virus dimasa Pandemi Covid-19 . Adapun beberapa jenis vaksin yang terdapat di Indonesia guna mencegah Covid-19 ialah : 1) *Sinovac*, merupakan vaksin yang mengandung *inactivated virus* yang diberikan melalui *intramuscular* dengan dosis 0,5 ml. Jenis vaksin ini merupakan vaksin pertama yang diberikan Pemerintah terhadap masyarakat di Indonesia. 2) *AstraZeneca*, merupakan vaksin yang mengandung viral vector yang memiliki kekuatan untuk mematikan Covid-19 varian Delta adapun jenis vaksin ini diberikan dalam dosis 2 ml. 3) *Sinopharm*, merupakan jenis vaksin darurat yang memiliki kandungan dan dosis yang sama dengan jenis *Sinovac* dengan efikasi keberhasilan 78% untuk mematikan virus. Jenis vaksin yang

digunakan untuk pemberian vaksin pada tahap 2. 4) *Moderna*, merupakan jenis vaksin yang berbasis *messenger RNA* dengan kinerja vaksin melalui pemanfaatan komponen materi genetik rekayasa. Jenis vaksin ini merupakan jenis vaksin yang digunakan untuk pemberian vaksin pada tahap 3 di Indonesia. 5) *Pfizer*, merupakan jenis vaksin berbasis *RNA* yang diberikan dengan dosis rendah yakni 0,3 ml dalam satu kali vaksin sedangkan pada jenis ini dibutuhkan 2 tahapan pemberian atau penyuntikkan vaksin untuk melawan Covid-19 tipe Delta. 6) *Novavax*, merupakan jenis vaksin yang mengandung antigen protein murni. Diketahui jika jenis vaksin ini tidak mampu menginfeksi Covid-19 . Adapun dosis yang diberikan ialah 0,5ml dalam 2 tahap (Nariswari, 2021).

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Efektivitas Program

Efektivitas program merupakan pemanfaatan sarana, prasarana, dan sumber daya untuk mendapatkan keberhasilan melalui barang ataupun jasa. Pada konsep ini, efektivitas dapat dijadikan sebagai penunjuk atas keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam membentuk dan melaksanakan kebijakan yang telah di tetapkan. Adapun tolok ukur atau indikator dari efektivitas program ialah : 1) Kejelasan tujuan dari kebijakan publik atau keberlangsungan program. 2) Pelaksanaan kegiatan di suatu program. 3) Produktivitas stakeholder. 4) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program. 5) Hasil yang di capai dari pelaksanaan program apakah sesuai dengan kebijakan yang di bentuk oleh stakeholder atau bahkan sebaliknya.

1.7.2 Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Adapun indikator dari Pemeirntahan Desa ialah : 1) Produktivitas. 2) Kualitas Pelayanan. 3) Resposivitas. 4) Responsibilitas.

1.7.3 Penanganan Wabah Pandemi

Penanganan wabah Covid-19 merupakan tindakan dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan pertahanan negara terkait penyakit menular sebagai isu sosial dan kesehatan yang membutuhkan perhatian serta tindakan khusus dalam penanganannya.

1.8 Definisi Operasional Penelitian

Pada penelitian yang bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas dari pelaksanaan program penanganan Pandemi Covid-19 serta faktor yang mempengaruhinya, maka peneliti menetapkan variabel penelitian ini ialah efektivitas dengan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanan program yang diukur berdasarkan tabel operasional sebagai berikut Gibson (19 97) dalam (Winardi, 1990) dan (Kharisma & Yuniningsih , 2017):

Tabel 1.2 Definisi Operasional Penelitian

Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Indikator Variabel Penelitian
Mengetahui dan memaparkan sejauh mana efektivitas Pemerintah Kalurahan Panggunharjo dalam pelaksanaan program	Efektivitas Program dalam menangani Pandemi Covid-19	Kejelasan program
		Pelaksanaan program
		Produktivitas stakeholder
		Pengawasan dan pengendalian Program

penanganan Pandemi Covid-19 di Kalurahan Panggungharjo		Hasil dari pelaksanaan kegiatan dalam program
Mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam mencapai efektivitas dari pelaksanaan program penanganan Pandemi Covid-19 di Kalurahan Panggungharjo.	Faktor dari efektivitas program penanganan Pandemi Covid-19	Kemampuan pelaksana program dalam mengkoordinasi anggota atau pelaksana program
		Keahlian dalam menangani masalah dalam program yang terlaksana
		Pengetahuan pelaksana program serta sikap dari pelaksana program
		Motivasi pelaksanaan program untuk mencapai kesuksesan hasil program

Gibson (19 97) dalam (Winardi, 1990) dan (Kharisma & Yuniningsih , 2017)

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan sifat dari fenomena serta gejala yang membahas tentang perkembangan hubungan objek penelitian dengan aspek sosial di masyarakat (Surachmad, 19 82). Metode ini memiliki karakteristik yang membutuhkan konsentrasi pada penyusunan masalah di penulisan dengan menyertakan pengumpulan data yang diatur, dijelaskan, dan dianalisis secara intensif dan terperinci (Nurmandi & Purnomo, 2011). Manfaat analisis kualitatif bertujuan agar dapat memahami, memaknai, dan mendefinisikan hubungan perbandingan antar gejala sosial yang saling berhubungan (Martono, 2011).

1.9.2 Lokasi Penelitian

Kantor Kelurahan Panggunharjo: Jalan K.H Ali Maksum, Panggunharjo, Sewon dan Puskesmas II Sewon : Jalan Parangtritis Km.6

1.9.3 Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilaksanakan peneliti di lokasi penelitian yakni pada Kelurahan Panggunharjo khususnya pada pihak Kelurahan Panggunharjo dan Puskesmas yang terdapat pada Kecamatan Sewon untuk mendapatkan data terkait pelaksanaan program penanganan Pandemi Covid-19 . Sedangkan data pendukung lainnya ialah data sekunder yang didapatkan peneliti dari penelitian terdahulu seperti jurnal dan prosiding seminar nasional sebagai bantuan acuan data dalam penulisan ini. Selain melalui penelitian terdahulu, penulis juga menggunakan sumber berita online dan website resmi pemerintahan.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

1.9.4.1 Wawancara

Adapun dalam tahap wawancara, narasumber yang peneliti pilih antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.3. Daftar Wawancara Narasumber

Informan Wawancara	Pertanyaan Wawancara
Kepala Kalurahan Panggunharjo	Bagaimana penanganan pandemic Covid-19 di Kalurahan Panggunharjo? apakah sudah terlaksana efektif?
	Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Panggunharjo untuk mencapai efektivitas pada pelaksanaan program penanganan pandemi Covid-19 di Kalurahan Panggunharjo?

	Faktor apa yang menghambat penyelenggaraan program penanganan Pandemi Covid-19 di Kalurahan Panggungharjo?
	Faktor apa yang mendukung penyelenggaraan program penanganan Pandemi Covid-19 di Kalurahan Panggungharjo?
	Apakah masyarakat Kalurahan Panggungharjo telah mendapatkan vaksin secara merata? kalau sudahm berapa jumlah penerima ?
	Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program penanganan Pandemi Covid-19 ini? apakah terdapat pihak monitoring selaku pengawas pada pelaksana program ?
	Bagaimana hasil dari pelaksanaan program penanganan Pandemi Covid-19 di Kalurahan Panggungharjo?
	Apa reaksi atau penilaian masyarakat terkait penanganan Pandemi Covid-19 di Kalurahan Panggungharjo?
Kepala Puskesmas Sewon II	Bagaimana peran puskesmas sewon II dalam turut serta pada pelaksanaan penanganan Pandemi Covid-19 di Kalurahan Panggungharjo?
	Siapakah pihak yang memiliki prioritas dalam penanganan Pandemi Covid-19 ?
	Adakah kendala dari Puskesmas saat melangsungkan program penanganan Pandemi Covid-19 diKalurahan Panggungharjo?
Masyarakat Kalurahan Panggungharjo Pria dan Wanita (17 tahun – 60 tahun)	Menurut anda apakah pelaksanaan program penanganan Pandemi Covid-19 Kalurahan Panggungharjo telah terlaksana efektif sesuai dengan kebutuhan dan jumlah penerima?
	Menurut anda, apakah ada kendala dalam penanganan Pandemi Covid-19 di Kalurahan Panggungharjo?
	Bagaimana upaya pemerintah dalam mensosialisasikan informasi terkait program penanganan Pandemi Covid-19 di Kalurahan Panggungharjo?

	Adakah kendala bagi masyarakat untuk memenuhi persyaratan pada penanganan Pandemi Covid-19 di Kelurahan Panggungharjo?
--	--

1.9.4.2 Observasi

Peneliti melakukan observasi penelitian sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan pada penelitian ini, yakni Kantor Kelurahan Panggungharjo dan Puskesmas Sewon II.

1.9.4.3 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara menyelidiki data seperti dari dokumen-dokumen, catatan, berita, file, atau hal-hal lain yang sudah di dokumentasikan agar terdapat fakta dan data yang di peroleh saat pelaksanaan wawancara atau dari media lainnya (Djaelani, 2013).

1.9.5 Teknik Analisa Data

Menurut Hadi (1986), teknik analisa data yang di gunakan pada penelitian kualitatif dapat di lakukan melalui wawancara, survey, dan kajian pustaka dari penelitian sebelumnya guna mendapatkan data-data terdahulu agar mempermudah peneliti dalam membandingkan dan menganalisis data yang ada menjadi suatu pembahasan yang menarik. Akan tetapi pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu dalam pencarian data sehingga mempermudah dalam mendapatkan data yang kemudian di kaji secara rinci ke dalam pembahasan guna mendapatkan kajian yang menarik. Adapun metode yang dapat di gunakan dalam analisis data

ialah metode induktif yang merupakan suatu pengambilan kesimpulan melalui data khusus yang di lanaskan fakta konkret untuk menarik generalisasi yang bersifat umum. Adapun rincian dari teknik analisa data sebagai berikut :

1.9.5.1 Reduksi data

Reduksi data merupakan penyaringan data-data kasar yang di temukan oleh peneliti baik di lapangan yakni lokasi penelitian terkait efektivitas program penanganan Pandemi Covid-19 di Kalurahan Panggungharjo yang mana peneliti akan menyaring data dari desa dan puskesmas sewon selaku tempat penelitian yang nantinya akan dikunjungi oleh peneliti guna mendapatkan data primer berupa ketepatan tujuan dan sasaran terkait vaksin di Kalurahan Panggungharjo, pelaksanaan penanganan Pandemi Covid-19 , produktivitas stakeholder yang turut serta dalam pelaksanaan program penanganan Pandemi Covid-19 . yakni Pemerintah Desa, Tim Kesehatan dan masyarakat Kalurahan Panggungharjo selaku penerimaan vaksin Covid-19 di Desa Panggungharjo. Penyaringan data lain ialah melalui penelitian sebelumnya agar memudahkan penulis dalam melakukan ringkasan dan pelaksanaan analisis sehingga penulis mendapatkan data akurat yang pantas untuk di tampilkan dalam penelitian ini. Bentuk analisis ini mampu menajamkan , menggolongkan, memilah sedemikian rupa untuk mendapatkan

penarikan hasil terkait efektivitas penanganan Pandemi Covid-19 di Kelurahan Panggunharjo.

1.9.5.2 Penyajian data

Setelah peneliti mengumpulkan data dan menyeleksi data yang di dapatkan dari lokasi penelitian, yakni Kelurahan Panggunharjo dan Puskesmas Sewon, maka peneliti akan melakukan penyajian data sesuai dengan kebutuhan penelitian agar tidak menampilkan kelebihan data yang mampu menimbulkan kerumitan analisa atau bahkan kekurangan data yang menyebabkan kurang relevan dan akuratnya penelitian tersebut sebab minimnya fakta di lapangan yang akan disesuaikan dengan variabel penelitian, yakni efektivitas dengan indikator yang terkait sehingga nantinya akan diselaraskan dengan topic penelitian yakni pelaksanaan penanganan Pandemi Covid-19 di Kelurahan Panggunharjo.

1.9.5.3 Matriks kesimpulan

Matrik kesimpulan merupakan penarikan benang merah yang penulis dapatkan dari perolehan data yang ditemukan peneliti berupa data primer atau sekunder mengenai penanganan Pandemi Covid-19 . Pada tahap ini penulis dapat membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang dapat menunjang permasalahan dalam penelitian ini mengingat terdapat beberapa rumusan masalah yang harus di selesaikan melalui pencarian jalan keluar dari hal-hal yang di jadikan perhatian dalam penelitian ini